

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Yuridis Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yaitu:
 - a. Kedudukan Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara
 - b. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Tata Pemerintahan yang Baik, dan Kepastian Hukum
 - c. Pencegahan Konflik Kepentingan
2. Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri yaitu:
 - a. Berlaku Final dan Mengikat (Final and Binding)
 - b. Pergeseran Makna Normatif
 - c. Memperkuat Prinsip *Good Governance*
 - d. Penguatan Prinsip Supremasi Konstitusi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah, guna mengatur larangan rangkap jabatan Wakil Menteri secara tegas, jelas, dan operasional. Pengaturan ini penting untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 agar memiliki daya laksana yang efektif dalam praktik ketatanegaraan.
2. Diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran larangan rangkap jabatan guna menjamin bahwa norma konstitusional yang telah ditegaskan benar-benar dipatuhi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Syafii, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bagir Manan, 2014, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, Bandung
- Harjono, D. K. ,2022, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*. UKI Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK, Jakarta
- , 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- ,2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2018, *Perkembangan Lembaga Negara dan Konstitusi di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maruarar Siahaan, 2018, *Hukum Acara MK*, Konpress, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: Gramedia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia,Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal

Ahmad Arya Saputra et al., 2024, “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14

Amri Marzali, 2020, “Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia,” *Res Publica Journal* 10, no. 2.

Arbie, A. 2024. Sifat final dan mengikat putusan MK berdasarkan asas erga omnes. *Lex Privatum*, 13(1).

Dian Furqani Tenrilawa, 2023 “Fungsi, Kewenangan dan Pengangkatan Wakil Menteri dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsulbar*, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/3219>.

D. Suparman, 2021, “Kepatuhan Terhadap Putusan MK dalam Implementasi Hukum,” *Lex Privatum Journal* 5, no. 1 33–45.

Efianingsih, D. 2024. Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 155-166.

Enny Agustina, 2018, “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*.

- Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, 2019 Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan MK, *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No. 2.
- Gaib, R. 2015. Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945. *Lex et Societatis*
- Indah Purwakasari Prasetyaningsih, 2012 “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut UndangUndang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” no. 39.
- Jimly Asshiddiqie. 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM* (Vol. 1)
- Kodiyat, B. A., & Pulungan, C, 2022, *Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Grondwet, 1(2).
- Listyani Effendi and Dewi Sulastri, 2021 ‘Diskresi Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara: Analisis Konstitusional Batasan dan Pertanggungjawaban dalam Sistem Presidensial Indonesia’ *SIYASI: Jurnal Trias Politica* vol 3 no 2
- M. Ali Safa’at, 2019 “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2.
- Muhammad Akbar Siregar, Joice Natalia Lubis, Patrecia Gabriella Siregar, and Novita Sari Sitompul, 2025 “Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4.
- Ramadian, P., & Iswandi, I. 2022. Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Rusnan, S. H. 2013, The Position Of Vice Minister And The Implication Thereof On Indonesiaâ€™ S Constitutional Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Sholichah, A. M., & Hidayati, R. A. 2023, Analisis Dampak Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di PT. YYY. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1).
- Utami Nur, Dyah Mutiarin, Hazel D. Jovita, Perla P. Palomares & Jack B. Isolana, 2025 “The Role of Good Governance Indicators in Controlling Corruption,” *Journal of Governance and Public Policy*.

Willy Wahyu Astuti, 2023 “The Indonesian President’s Prerogative Rights in the Appointment of Ministers after the Amendment to the 1945 Constitution,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 3.

E. Sumber Lain

“MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan, Termasuk Komisaris BUMN”, *Salingka Media*, 1 September 2025, <https://salingkamedia.com/mahkamah-konstitusi-tegaskan-wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan-termasuk-komisaris-bumn/>.

Antara News, “*Ini Pertimbangan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan*,” 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/5070805>.

Antara News, “*Wamen Diangkat oleh Presiden, Bertanggung Jawab kepada Menteri*,” 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/1288686/wamen-diangkat-oleh-presiden-bertanggung-jawab-kepada-menteri>.

CNN Indonesia “*Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK dan Kekuatan Hukumnya*,” *CNN Indonesia*, 14 Juni 2023, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230614154148-561-961815/mengenal-jenis-jenis-putusan-mk-dan-kekuatan-hukum>.

DetikNews, “*Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Diganti*”, news.detik.com

Hukumonline, “*MK Putuskan Larangan Rangkap Jabatan Berlaku bagi Wakil Menteri*,” 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-larangan-rangkap-jabatan-berlaku-bagi-wakil-menteri-lt68b11cf8663c9>.

Kompas, “*Celah Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri*,” 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/07/09/165604726>.

Kompas. Com “*31 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN*”, money.kompas.com

MK Republik Indonesia, “*Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan*”, mkri.id.

Media Indonesia, “*MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan*,” 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/805907>.

Nicholas Martua Siagian, “Menanti Perpres Larangan Rangkap Jabatan Pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025,” *Law UI*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/menanti-perpres-larangan-rangkap-jabatan-pasca-putusan-mk-nomor-128-puu-xxiii-2025-oleh-nicholas-martua-siagian/>. Diakses 21 Januari 2026

NU Online, “*Respons Istana soal Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN*”, nu.or.id.

Puspan Laku UU DPR RI, *Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, diakses dari <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/detail-evaluasi/id/14>. Diakses 21 Januari 2026

Times Indonesia, “*Wakil Menteri Rangkap Jabatan dan Krisis Etika Konstitusional*,” 2025, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/546278>.

Transparency International Indonesia, “*Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri*,” 2024, <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri>.